



**LAPORAN INTELIJEN KHUSUS
TENTANG
PENINGKATAN HARGA KOMODITAS
BAHAN PANGAN POKOK DI BEBERAPA DAERAH**





LAPORAN INTELIJEN KHUSUS
TENTANG
PENINGKATAN HARGA KOMODITAS BAHAN PANGAN
POKOK DI BEBERAPA DAERAH





INDIKASI

INDIKASI

- HINGGA MINGGU KETIGA JANUARI 2018, TREND/KECENDERUNGAN KENAIKAN HARGA SEJUMLAH KOMODITAS BAHAN PANGAN POKOK DI BEBERAPA DAERAH, TERUTAMA DI ACEH, SUMSEL, KEP. BABEL, LAMPUNG, BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TIMUR, KALBAR, KALTARA, SULBAR, SULTRA, PAPUA BARAT, DAN PAPUA MASIH RELATIF TINGGI, SEPERTI BERAS, KEDELAI, DAGING SAPI, DAGING AYAM, JAGUNG, MIE INSTAN, DAN KACANG-KACANGAN. SEMENTARA HARGA CABAI RAWIT, CABAI MERAH KERITING, CABAI MERAH BESAR, DAGING AYAM RAS, DAN TELUR AYAM RAS CENDERUNG FLUKTUATIF, NAMUN MASIH BERTAHAN PADA HARGA YANG CUKUP TINGGI.
- TERKAIT KOMODITAS BERAS, KEMANTAN MENGLAIM PRODUKSI BERAS SELAMA 2017 MENGALAMI SURPLUS SEBANYAK 400.000 TON. SEMENTARA, TINGKAT SERAPAN BERAS BULOG PER 30 NOVEMBER 2017, SEBANYAK 2.138.504 TON (57%) DARI TARGET PADA 2017 SEBESAR 3.737.019 TON.
- STOK BERAS PER 10 JANUARI 2018 SEBANYAK 914.401 TON, TERDIRI DARI *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* (PSO) TERMASUK CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP) SEBESAR 905.020 TON DAN BERAS KOMERSIAL 9.381 TON.
- SEMENTARA ITU, SELAMA DESEMBER 2017 S.D. MINGGU KETIGA JANUARI 2018 TERJADI KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI (ACEH, JATENG, JATIM, KALSEL, SULSEL, NTB, DAN NTT), SERANGAN HAMA (ACEH, SUMUT, RIAU, SUMSEL, BANTEN, JATENG, JATIM, BALI, DAN NTT), BENCANA BANJIR (ACEH, SUMUT, JAMBI, SUMBAR, SUMSEL, BENGKULU, RIAU, BANTEN,



DIY, JATIM, KALSEL, KALTIM, SULSEL, DAN NTB), ALIH FUNGSI LAHAN (ACEH, JAMBI, BENGKULU, SUMBAR, JABAR, DIY, BALI, DAN SULTENG), SERTA KERUSAKAN JARINGAN IRIGASI (ACEH, SUMBAR, SUMSEL, BENGKULU, BANTEN, NTB, DAN PAPUA BARAT).





ANALISIS DAN DAMPAK

ANALISIS

- RELATIF TINGGINYA HARGA KOMODITAS BAHAN PANGAN POKOK DI BEBERAPA DAERAH PADA UMUMNYA LEBIH DISEBABKAN MASIH TINGGINYA INTENSITAS CURAH HUJAN SEJAK DESEMBER 2017 HINGGA AWAL JANUARI 2018. KENAIKAN HARGA DAGING AYAM RAS DIPICU OLEH BERKURANGNYA PASOKAN *DAY OLD CHICKEN* (DOC) DAN KENAIKAN HARGA PAKAN TERNAK, SEDANGKAN KENAIKAN HARGA TELUR AYAM RAS DIPICU OLEH PENURUNAN PRODUKTIVITAS AKIBAT SERANGAN VIRUS H9N2 DAN DISTRIBUSI VAKSIN YANG BELUM MERATA.
- KENAIKAN HARGA BERAS DI BEBERAPA DAERAH TAMPAK LEBIH DISEBABKAN ADANYA KETIMPANGAN/KESENJANGAN STOK BERAS YANG TIDAK MERATA DI BEBERAPA DAERAH, SEHINGGA TINGGINYA PERMINTAAN KONSUMEN DARI DAERAH TERTENTU YANG STOKNYA MENIPIS CENDERUNG TELAH MEMICU NAIKNYA HARGA BERAS.
- RENDAHNYA SERAPAN BULOG SEPANJANG 2017 KETIKA SURPLUS BERAS TERJADI MENGINDIKASIKAN BAHWA KINERJA BULOG SEBAGAI STABILITATOR HARGA PANGAN BELUM BERJALAN OPTIMAL. KETIKA MUSIM PACEKLIK TERJADI PADA BULAN JANUARI – FEBRUARI 2018, BULOG SEHARUSNYA MAMPU MEREDAM GEJOLAK HARGA DENGAN MELAKUKAN OPERASI PASAR MENGGUNAKAN STOK YANG DIMILIKINYA.
- DI SISI LAIN, KLAIM SURPLUS BERAS YANG DILAPORKAN KEMANTAN PENTING UNTUK DIKLARIFIKASI DAN EVALUASI KARENA MASIH DITEMUKAN KENAIKAN HARGA BERAS DAN GABAH YANG TERJADI DI WILAYAH SENTRA.



- **SEMENTARA ITU, BEBERAPA FAKTOR LAIN YANG MEMICU KENAIKAN HARGA KOMODITAS BAHAN PANGAN POKOK, DIANTARANYA BENCANA BANJIR, SERANGAN HAMA, KELANGKAAN PUPUK, KERUSAKAN JARINGAN IRIGASI, DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN.**
- **BANJIR MERUPAKAN FENOMENA ALAM YANG HAMPIR TERJADI SETIAP TAHUN AKIBAT CURAH HUJAN YANG TINGGI, HINGGA MELEBIHI KAPASITAS SALURAN AIR. BANJIR BERPOTENSI MELUAS AKIBAT BANYAKNYA DAERAH BANTARAN SUNGAI YANG TIDAK BERFUNGSI MAKSIMAL MENYERAP AIR, SEHINGGA MENAKIBATKAN AIR SUNGAI MELUAP HINGGA MERENDAM DAN MERUSAK TANAMAN PANGAN.**
- **POLA TANAM YANG KURANG TEPAT, YAKNI TIDAK DILAKUKAN SECARA SEREMPAK DAN TANPA JEDA MENAKIBATKAN SIKLUS MAKANAN BAGI HAMA TIDAK TERPUTUS, SEHINGGA MEMICU PERKEMBANGBIAKAN HAMA. TERLEBIH LAGI, BIBIT PADI YANG DITANAM BUKAN BIBIT UNGGUL TAHAN HAMA. DISAMPING ITU, PEMBERANTASAN HAMA DENGAN MENGGUNAKAN OBAT PEMBASMI HAMA YANG TIDAK TEPAT DOSIS DAN TEPAT WAKTU, SERTA TIDAK DILAKUKAN SECARA SERENTAK MEMBUAT SEMAKIN MENINGKATNYA DAYA TAHAN HAMA. DAMPAKNYA, TIDAK HANYA MEMPERCEPAT POPULASI HAMA, NAMUN JUGA MERUSAK KESUBURAN TANAH.**
- **ADANYA SELISIH SEKITAR 3,63 JUTA TON ANTARA ALOKASI DENGAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MERUPAKAN SALAH SATU PENYEBAB TERJADINYA KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI. KONDISI TERSEBUT DIPERPARAH LAGI DENGAN ADANYA PERMAINAN PARA SPEKULAN YANG MEMANFAATKAN DISPARITAS HARGA UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN BERLIPAT, ANTARA LAIN DENGAN CARA MENIMBUN, MENJUAL KE PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERHAK, DAN MEMPERMAINKAN HARGANYA.**
- **RUSAKNYA INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI SANGAT BERPENGARUH TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN. FAKTOR UTAMA YANG MENJADI PENYEBAB RUSAKNYA INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI ADALAH IKLIM EKSTREM DAN CURAH HUJAN YANG TINGGI, DISAMPING KUALITAS BANGUNAN YANG RENDAH DAN USIA INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI SUDAH TUA.**



- MARAKNYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN SELAIN KARENA MENURUNNYA NILAI EKONOMI DI SEKTOR PERTANIAN, JUGA TIDAK TERLEPAS DARI KEBIJAKAN PEMDA SETEMPAT YANG LEBIH MEMPRIORITASKAN KEPENTINGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DENGAN MENGORBANKAN SEKTOR PERTANIAN. DI SISI LAIN, REGULASI TERKAIT PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN JUGA BELUM DIIMPLEMENTASIKAN DI LAPANGAN.

DAMPAK

- KENAIKAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK YANG TIDAK TERKENDALI DAPAT MENGURANGI DAYA BELI MASYARAKAT DAN BERPOTENSI MEMICU INFLASI.
- BERKURANGNYA MINAT PETANI DALAM MENANAM BAHAN PANGAN AKIBAT HARGA YANG RENDAH DAN TIDAK MAMPU DIKONTROL PEMERINTAH.
- SEMAKIN TINGGINYA KETERGANTUNGAN TERHADAP IMPOR PANGAN YANG BERDAMPAK PADA SEMAKIN LEMAHNYA KEDAULATAN PANGAN NEGARA.
- RAWAN DIMANFAATKAN KELOMPOK KEPENTINGAN UNTUK MENDISKREDITKAN PEMERINTAH DAN DIJADIKAN SENJATA UNTUK MENYERANG PRESIDEN GUNA KEPENTINGAN POLITIK 2019.
- DAPAT MENAMBAH JUMLAH KEMISKINAN DAN BERPOTENSI MENJADI PERMASALAHAN SOSIAL YANG RENTAN MEMICU GEJOLAK SOSIAL.
- DAPAT MEMPERLEMAH KETAHANAN PANGAN NASIONAL DAN MENGHAMBAT SWASEMBADA PANGAN NASIONAL.





UPAYA DAN SARAN

UPAYA

- BIN TERUS MEMONITOR PERKEMBANGAN KENAIKAN HARGA KOMODITAS BAHAN PANGAN POKOK DI DAERAH, SERTA MENINGKATKAN DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI TERHADAP KERAWANAN MASALAH SEKTOR PANGAN YANG DAPAT BERPENGARUH PADA STABILITAS ASPEK SOSIAL-POLITIK DI DAERAH, TERUTAMA DALAM MOMENTUM TAHAPAN PILKADA 2018.
- BIN TERUS MELAKUKAN CIPTA KONDISI DAN CIPTA OPINI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA MASSA GUNA MEMINIMALISIR BERKEMBANGNYA ISU NEGATIF DI BIDANG EKONOMI YANG CENDERUNG MENDISKREDITKAN PEMERINTAH, SERTA MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENGENDALIKAN HARGA PANGAN SECARA NASIONAL.
- BIN TERUS MEMONITOR DAN MEMETAKAN FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KENAIKAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK DI PASARAN, KHUSUSNYA TERKAIT BENCANA BANJIR, SERANGAN HAMA, KELANGKAAN PUPUK, KERUSAKAN JARINGAN IRIGASI, DAN MARAKNYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN.

SARAN

PRESIDEN MEMERINTAHKAN :

- **MENTAN DAN MENDAG MENGADAKAN KONFERENSI PERS BERSAMA UNTUK MENJELASKAN SELURUH PERSOALAN PANGAN YANG RASIONAL**



DAN MASUK AKAL BERDASARKAN DATA DAN FAKTA KEPADA PUBLIK TERKAIT CADANGAN/STOK DAN IMPOR PANGAN, KHUSUSNYA BERAS.

- MENTAN SENANTIASA MENJAGA KETERSEDIAAN PANGAN DENGAN HARGA TERJANGKAU. SELAIN ITU, BERSAMA KA BULOG MENYERAP BERAS PETANI SERTA MELAKUKAN OPERASI PASAR DI SEMUA PASAR-PASAR RAKYAT DENGAN PRIORITAS DI DAERAH YANG HARGANYA TINGGI DAN PASOKANNYA KOSONG, DENGAN HARGA DIBAWAH HET.
- MENTAN, MENDAG, DAN KEPALA BPS SEGERA MEMPERBAIKI DATA PANGAN, KHUSUSNYA BERAS AGAR BISA MENJADI ACUAN YANG TEPAT DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN TERKAIT PANGAN.
- MENDAG MENGINVENTARISIR DATA YANG VALID TERKAIT STOK CADANGAN PANGAN PEMERINTAH, PASOKAN, PRODUKSI, DAN KEBUTUHAN PANGAN SECARA NASIONAL SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN UNTUK MENGAMBIL KEBIJAKAN, TERMASUK IMPOR.
- MENSOS BEKERJA SAMA DENGAN MENDAGRI DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) UNTUK SEGERA MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI MENGHADAPI BANJIR DAN TANAH LONGSOR YANG BERISI KEBIJAKAN, STRATEGI, KOMANDO, PENGERAHAN SUMBER DAYA, TERMASUK MENGINVENTARISASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN LOGISTIK.
- MENRISTEK-DIKTI BERSINERGI DENGAN KA LIPI DAN LEMBAGA PENELITIAN BENIH UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBANGAN BENIH PADI TAHAN HAMA DAN OBAT PEMBASMI HAMA YANG RAMAH LINGKUNGAN.
- MENTAN, MENDAG, DAN MENDAGRI MELAKUKAN PEMBENAHAN POLA DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI SECARA MENYELURUH DAN MENGEVALUASI ALOKASI PUPUK DI MASING-MASING DAERAH, SERTA MENGINTENSIFKAN PENGAWASAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI.
- MENTERI PUPR MELAKUKAN EVALUASI DAN PENGAWASAN TERHADAP POLA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN JARINGAN IRIGASI SECARA BERKALA, SERTA MELAKUKAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI YANG MENGALAMI KERUSAKAN.
- MENDAGRI, MENTERI ATP/BPN, DAN MENTAN TERUS MENGAWAL PEMBERLAKUAN UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN



LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENJADIKAN PERTANIAN SEBAGAI BAGIAN KETAHANAN NASIONAL. SELAIN ITU, MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PEMDA AGAR MENYELESAIKAN PERDA TENTANG RTRW GUNA MENCEGAH BERLANJUTNYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN.

- **MENKOMINFO TERUS MEMVIRALKAN LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJAMIN STABILITAS HARGA DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN BAGI MASYARAKAT.**





LAMPIRAN

KENAIKAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK :

1. Perkembangan harga bahan pokok di nasional pada 22 Januari 2018 dibandingkan dengan harga seminggu sebelumnya dan satu bulan sebelumnya adalah sbb :

Perkembangan Harga Bahan Pokok Nasional

Komoditas	Harga Sebulan Sebelum 23 Des 2017	Harga Seminggu Sebelum 15 Jan 2018	Harga 22 Jan 2018	Perubahan Harga	
				22 Jan 2018 dibanding 15 Jan 2018 (Seminggu)	22 Jan 2018 dibanding 23 Des 2017 (Sebulan)
Beras Medium	10.761	11.037	11.112	0,7%	3,2%
Gula Pasir	12.777	12.531	12.448	-0,7%	-2,6%
Minyak Goreng Curah	11.660	11.492	11.471	-0,2%	-1,6%
Tepung Terigu	9.224	9.125	9.124	-0,0%	-1,1%
Kedelai Lokal	10.445	11.054	10.824	-2,1%	3,5%
Kedelai Impor	10.826	10.777	10.692	-0,8%	-1,3%
Daging Sapi	117.352	117.518	116.772	-0,6%	-0,5%
Daging Ayam Ras	32.840	33.874	32.730	-3,5%	-0,3%
Telur Ayam Ras	25.790	25.261	24.529	-3,0%	-5,1%
Cabai Merah Besar	32.556	35.802	35.011	-2,3%	7,0%
Cabai Merah Keriting	33.242	36.320	36.503	0,5%	8,9%
Cabai Rawit Merah	39.507	46.051	42.843	-7,5%	7,8%
Bawang Merah	25.337	24.569	23.982	-2,4%	-5,7%
Bawang Putih	23.422	22.995	23.051	0,2%	-1,6%

Sumber : Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan



2. Pada 22 Januari 2018 di Kab. Bandung, Jabar, beberapa bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga sejak seminggu terakhir, antara lain beras Kepala dari Rp12.000,- menjadi Rp13.000,- per kg, beras IR 64 dari Rp12.000,- menjadi Rp13.000,- per kg, daging ayam dari Rp34.000,- menjadi Rp35.000,- per kg, dan cabai rawit dari Rp50.000,- menjadi Rp52.000,- per kg.
3. Pada 22 Januari 2018 di Kota Pontianak, Kalbar, sejak Minggu ke-2 Januari 2018, harga bawang putih naik dari Rp17.000,- menjadi Rp18.000,- per kg dan cabai merah keriting dari Rp49.000,- menjadi Rp52.000,- per kg.
4. Pada 22 Januari 2018 di Kota Ambon, Maluku, sejak seminggu terakhir harga cabai merah naik dari Rp25.000,- menjadi Rp28.000,- per kg dan cabai merah keriting dari Rp20.000,- menjadi Rp25.000,- per kg.
5. Pada 22 Januari 2018 di Kota Jambi, Jambi, dibanding 15 Januari 2018, harga cabai merah naik dari Rp26.000,- menjadi Rp42.000,- per kg dan cabai merah besar dari Rp40.000,- menjadi Rp46.000,- per kg.
6. Pada 21 Januari 2018 di Kota Palu, Sulteng, harga beras Bramo dan Cimandi naik menjadi Rp510.000,- per 50 kg dibanding awal Januari 2018 sebesar Rp480.000,-
7. Pada 21 Januari 2018 di Kota Bandung, Jabar, harga daging ayam naik menjadi Rp40.000,- per kg dibanding awal Januari 2018 sebesar Rp35.000,-
8. Pada 21 Januari 2018 di Kab. Kebumen, Jateng, harga beberapa bahan pangan pokok mengalami kenaikan dibanding 14 Januari 2018. Harga beras Rojo Lele naik dari Rp12.500,- menjadi Rp13.500,- per kg, beras Mentik Wangi dari Rp12.000,- menjadi Rp13.500,- per kg, beras IR 64 dari Rp10.000,- menjadi Rp11.500,- per kg, gula pasir dari Rp11.000,- menjadi Rp11.400,- per kg, minyak goreng dari Rp10.000,- menjadi Rp11.300,- per liter, cabai merah besar dari Rp35.000,- menjadi Rp41.000,- per kg, cabai merah keriting dari Rp37.000,- menjadi Rp41.000,- per kg, cabai rawit dari Rp49.000,- menjadi Rp50.000,- per kg, dan bawang merah dari Rp20.000,- menjadi Rp23.000,- per kg.
9. Pada 21 Januari 2018 di Kab. Banjarbaru, Kalsel, harga beberapa bahan pangan mengalami kenaikan dibanding Minggu ke-2 Januari 2018. Harga telur ayam naik dari Rp24.500,- menjadi Rp25.500,- per kg, cabai merah dari Rp35.000,- menjadi Rp42.000,- per kg, bawang merah dari Rp20.000,- menjadi Rp21.000,- per kg.



10. Pada 20 Januari 2018 di Kab. Muaro Jambi, Jambi, harga beberapa bahan pangan mengalami kenaikan dibanding 11 Januari 2018. Harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000,- menjadi Rp50.000,- per kg, cabai merah dari Rp30.000,- menjadi Rp35.000,- per kg, dan cabai rawit dari Rp45.000,- menjadi Rp50.000,- per kg.
11. Pada 20 Januari 2018 di Kab. Merangin, Jambi, harga beberapa bahan pangan mengalami kenaikan dibanding 11 Januari 2018. Harga cabai merah keriting naik dari Rp45.000,- menjadi Rp50.000,- per kg, cabai rawit dari Rp35.000,- menjadi Rp40.000,- per kg, bawang merah dari Rp38.000,- menjadi Rp42.000,- per kg, bawang putih dari Rp30.000,- menjadi Rp34.000,- per kg, dan telur ayam dari Rp42.000,- menjadi Rp49.000,- per papan.
12. Pada 20 Januari 2018 di Kab. Karawang, Jabar, harga beberapa bahan pangan mengalami kenaikan dibanding 12 Januari 2018. Harga gula pasir dari Rp13.000,- menjadi Rp14.000,- per kg, cabai merah dari Rp42.000,- menjadi Rp44.000,- per kg, cabai merah dari Rp36.000,- menjadi Rp42.000,- per kg, dan cabai hijau dari Rp32.000,- menjadi Rp35.000,- per kg.
13. Pada 20 Januari 2018 di Kab. Wonosobo, Jateng, harga beberapa bahan pangan mengalami kenaikan dibanding 12 Januari 2018. Harga beras Ciherang naik dari Rp10.500,- menjadi Rp11.000,- per kg, beras Barito dari Rp12.500,- menjadi Rp13.000,- per kg, daging ayam dari Rp28.000,- menjadi Rp33.000,- per kg, cabai merah dari Rp16.000,- menjadi Rp25.000,- per kg, cabai hijau dari Rp12.000,- menjadi Rp15.000,- per kg, cabai merah keriting dari Rp18.000,- menjadi Rp29.000,- per kg, cabai hijau keriting dari Rp13.000,- menjadi Rp23.000,- per kg, cabai rawit merah dari Rp21.000,- menjadi Rp25.000,- per kg, cabai rawit hijau dari Rp13.500,- menjadi Rp26.500,- per kg, bawang merah dari Rp25.000,- menjadi Rp26.000,- per kg, dan bawang putih dari Rp26.000,- menjadi Rp27.000,- per kg.
14. Pada 19 Januari 2018 di Kab. Gianyar, Bali, sejak akhir Desember 2017, harga beras premium naik dari Rp11.000,- menjadi Rp12.000,- per kg dan beras C4 Super dari Rp10.500,- menjadi Rp11.000,- per kg.
15. Pada 19 Januari 2018 di Kota Salatiga, Jateng, harga beberapa bahan pangan mengalami kenaikan dibanding 11 Januari 2018. Harga beras IR 64 naik dari Rp10.500,- menjadi Rp11.000,- per kg, daging ayam dari Rp34.000,- menjadi Rp35.000,- per kg, dan daging ayam kampung dari Rp50.000,- menjadi Rp52.000,- per kg.



16. Pada 19 Januari 2018 di Kab. Pati, Jateng, sejak seminggu terakhir harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000,- menjadi Rp42.000,- per kg, cabai merah dari Rp50.000,- menjadi Rp52.000,- per kg, cabai rawit merah dari Rp50.000,- menjadi Rp54.000,- per kg, dan cabai rawit hijau dari Rp42.000,- menjadi Rp50.000,- per kg.
17. Pada 19 Januari 2018 di Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu, dibanding minggu ke-2 Januari 2018 harga beras naik dari Rp14.000,- menjadi Rp20.000,- per 1,5 kg.
18. Pada 19 Januari 2017 di Kab. Tabanan, Bali, sejak seminggu terakhir harga beras medium naik dari Rp9.500,- menjadi Rp11.500,- per kg.
19. Pada 19 Januari 2018 di Kab. Bulungan, Kaltara, dibanding minggu ke-2 Januari 2018 harga daging ayam naik dari Rp42.000,- menjadi Rp45.000,- per kg.
20. Pada 19 Januari 2018 di Kab. Pemasang, Jateng, sejak seminggu terakhir harga beras IR 64 naik dari Rp11.400,- menjadi Rp11.950,- per kg, minyak goreng dari Rp11.000,- menjadi Rp11.500,- per liter, cabai merah keriting dari Rp32.000,- menjadi Rp38.000,- per kg, dan bawang putih dari Rp20.000,- menjadi Rp22.000,- per kg.
21. Pada 19 Januari 2018 di Kab. Maros, Sulsel, sejak seminggu terakhir, harga beras Kepala naik dari Rp9.000,- menjadi Rp9.500,- per kg, gula pasir dari Rp12.000,- menjadi Rp14.000,- per kg, minyak goreng dari Rp13.000,- menjadi Rp14.000,- per liter, daging ayam ras dari Rp40.000,- menjadi Rp45.000,- per ekor, dan daging ayam kampung dari Rp80.000,- menjadi Rp110.000,- per kg.
22. Pada 11 Januari 2018 di Kab. Gunung Kidul, DIY, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, Momon Rusmono mengatakan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras karena produksi Desember 2017 di lahan seluas 1,1 juta hektare menghasilkan 6 juta ton gabah kering giling atau 3 juta ton beras. Jumlah tersebut mampu mencukupi kebutuhan nasional sebesar 2,6 juta ton sehingga masih surplus 0,4 juta ton beras. Selain itu, pada periode 2015-2017, jumlah produksi beras Indonesia terus meningkat yakni 2015 sebesar 75.397.841 ton gabah (42 juta ton beras), 2016 sebesar 79.354.767 ton gabah (44 juta ton beras), dan pada 2017 mencapai 81.382.451 ton gabah (45 juta ton beras).



23. Pada 11 Januari 2018 di Kab. Sragen, Jateng, sejak awal tahun harga beras mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Beras yang mengalami kenaikan, antara lain beras IR 64 kualitas super dari Rp11.000,- menjadi Rp11.500,- per kg dan beras IR 64 kualitas biasa dari Rp10.000,- menjadi Rp10.500,- per kg
24. Pada 11 Januari 2018 di Kab. Indramayu, Jabar, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras yang mencapai 30% atau sekitar Rp13.200,- per kg untuk jenis premium. Kenaikan disebabkan adanya permainan harga dan penimbunan yang dilakukan para spekulan, juragan-juragan beras (tengkulak), pengusaha penggilingan padi, serta oknum pengawas dari instansi terkait.
25. Pada 11 Januari 2018 di Jakarta, Peneliti Institute of Development for Economics and Finance (Indef), Bima Yudisthira, menegaskan rencana Kemendag melakukan impor beras akan mengancam produksi padi pada 2018. Lahan sawah tak akan menarik untuk digarap karena pasar sudah tidak menguntungkan lagi bagi petani ketika menjual padi atau berasnya. Sementara, Pengamat Pertanian IPB, Dwi Andreas memperkirakan harga beras akan terus melonjak hingga melebihi Rp12.000,- per kg secara rata-rata nasional karena pemerintah tidak dapat mengatasi kurangnya pasokan beras hingga menembus harga psikologis yaitu Rp11.000,- per kg.
26. Pada 10 Januari 2018 di Jakarta, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, kenaikan harga beras terjadi akibat minimnya serapan Bulog. Pada 2017, total serapan beras Bulog hanya 2,1 juta ton atau 58% dari target. Padahal, Bulog bisa menyerap secara komersial bila harga gabah kering panen (GKP) di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selain itu, Bulog tidak maksimal menggelar operasi pasar sehingga harga beras tinggi.
27. Data serapan Perum Bulog periode Januari s.d. 30 November 2017, tercatat sebanyak 2.138.504 ton (57%) dari target pada 2017 sebesar 3.737.019 ton. Sementara, stok beras Perum Bulog per 10 Januari 2018 sebanyak 914.401 ton, terdiri dari *Public Service Obligation* (PSO) termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 905.020 ton beras dan beras komersial 9.381 ton. Stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan beras sejahtera (rastra) nasional selama 7,95 bulan kedepan atau masih diatas rata-rata batas minimal yakni diatas 3 bulan.



28. Pada 8 Januari 2018 di Jakarta, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Arief Prasetyo mengatakan, terjadi penurunan pasokan beras dari daerah sentra produksi secara drastis yang menyebabkan kelangkaan beras medium di sejumlah toko beras di Jabodetabek. Jika biasanya perusahaan mengambil beras dari sentra produksi, seperti Jabar, Jateng, dan Jatim, saat ini FSTJ hanya mengandalkan pasokan dari Perum Bulog untuk melakukan stabilisasi harga di Jakarta. Sementara, Kepala Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Endang Sundhara mengatakan, pasokan beras ke PIBC hanya sekitar 17.181 ton, sedangkan yang keluar sebesar 19.808 ton, sehingga mengakibatkan kenaikan harga beras medium dan premium. Harga beras premium naik dari Rp12.000,- menjadi Rp12.500,- per kg, sementara beras medium dari Rp8000,- naik menjadi Rp8.800,- per kg. Stok beras per 7 Januari 2018 sebesar 32.698 ton yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan warga DKI Jakarta selama 12 hari.
29. Pada 8 Januari 2018 di Jakarta, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri mengatakan, pasokan beras yang menurun dari sentra produksi di daerah memperparah kelangkaan beras di sejumlah pasar yang terjadi sejak Desember 2017. Hal itu disebabkan harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah sentra produksi beras naik di kisaran Rp6.600,- sampai Rp7.000,- per kg dari harga normal Rp4.500,- per kg.

BENCANA BANJIR :

1. Pada 22 Januari 2018 di Kab. Pandeglang, Banten, bencana banjir terjadi di Kec. Sobang, akibat luapan Sungai Ciamandah, Sungai Cilatak, dan Sungai Kalikada, dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 2 m. Sekitar 145 ha sawah terendam banjir, sehingga terancam mengalami gagal panen.
2. Pada 15 Januari 2018 di Kab. Barru, Sulsel, terjadi bencana banjir akibat tingginya intensitas curah hujan yang merendam sawah di Kec. Soppeng Riaja, Ballusu, Barru, dan Mallusetasi.
3. Pada 15 Januari 2018 di Kota Parepare, Sulsel, banjir mengakibatkan sekitar 10 ha tanaman padi berumur sekitar 2 bulan di Kec. Bacukiki terendam air dengan ketinggian sekitar 1 m, sehingga terancam mengalami gagal panen.
4. Pada 10 Januari 2018 di Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalsel, bencana banjir merendam sekitar 371 ha tanaman padi di Kec. Barabai, 8 ha tanaman padi di Kec. Batang Alai Selatan, serta 683 ha tanaman padi di Kec. Batang Alai Utara.



5. Pada 9 Januari 2018 di Kab. Aceh Utara, Aceh, sekitar 1.000 ha tanaman padi di Kec. Pirak Timu mati akibat terendam banjir.
6. Pada 7 Januari 2018 di Kab. Lamongan, Jatim, sekitar 20 ha sawah di Desa Banaran dan Desa Truni, Kec. Babat terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo, sehingga terancam mengalami gagal panen.
7. Pada 4 Januari 2018 di Kab. Tebo, Jambi, sekitar 30 ha sawah di Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir rusak akibat terendam banjir.
8. Pada 2 Januari 2018 di Kab. Seluma, Bengkulu, sekitar 25 ha tanaman padi di Desa Pasar Seluma terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50-70 cm akibat luapan Sungai Air Ngalam (Sungai Cuming) dan Sungai Batanghari Seluma.
9. Pada 29 Desember 2017 di Kab. Ogan Komering Ilir, Sumsel, bencana banjir menggenangi sekitar 4.246 ha tanaman padi yang tersebar di 11 kecamatan, dan 69 ha diantaranya telah dinyatakan puso atau gagal panen. Banjir juga berdampak pada realisasi tanaman padi yang hanya mencapai 158.831 ha dari target seluas 170.000 ha.
10. Pada 22 Desember 2017 di Kab. Maros, Sulsel, sekitar 315 ha tanaman padi terendam banjir, sehingga terancam mengalami gagal panen, dengan rincian 45 ha di Kec. Maros Baru, 250 ha di Kec. Bantimurung, dan 20 ha di Kec. Lau.
11. Pada 21 Desember 2017 di Kab. Sumbawa Barat, terjadi bencana banjir dengan ketinggian air mencapai 15 s.d. 20 cm akibat tingginya intensitas hujan dan kurang berfungsinya saluran air, sehingga mengakibatkan sekitar 15 ha sawah tergenang.
12. Pada 21 Desember 2017 di Kab. Pinrang, Sulsel, bencana banjir merendam sekitar 1.553 ha tanaman padi yang tersebar di Kec. Lanrisang, Kec. Watang Sawitto, Kec. Mattiro Bulu, dan Kec. Tiroang, dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta Rupiah.
13. Pada 21 Desember 2017 di Kab. Takalar, Sulsel, bencana banjir merendam sekitar 395 ha tanaman padi di Kec. Polongbangkeng Selatan, 245 ha di Kec. Mangarabombang, dan 12 ha di Kec. Galesong Selatan.
14. Pada 20 Desember 2017 di Kota Sungai Penuh, Jambi, sekitar 265 ha sawah di Kec. Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan Kumun Debai terendam banjir, 28 ha di antaranya mengalami puso.



15. Pada 19 Desember 2017 di Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim, sekitar 500 ha lahan persawahan di Desa Sumber Sari, Kec. Babulu terendam air luapan Sungai Telake dengan ketinggian mencapai 30 cm.
16. Pada 17 Desember 2017 di Kab. Toba Samosir, Sumut, sekitar 2 ha tanaman padi di Desa Meat, Kec. Tampahan rusak akibat banjir.
17. Pada 15 Desember 2017 di Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi, sekitar 460,75 ha tanaman padi di Kec. Berbak dan Kec. Rantau Rasau mengalami gagal panen akibat terendam banjir rob dan luapan Sungai Batanghari.
18. Pada 14 Desember 2017 Kota Banda Aceh, Aceh, bencana banjir merendam sekitar 11.146 ha tanaman padi di Kab. Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat, dan Pidie, sehingga mengakibatkan 2.655 ha di antaranya mengalami puso.
19. Pada 13 Desember 2017 di Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta, sekitar 385,2 ha lahan pertanian di Kec. Karangmojo, Kec. Playen, dan Kec Gedangsari mengalami gagal panen karena bencana banjir dan tanah longsor. Akibatnya, produksi padi pada 2018 akan berkurang sekitar 325 ton. Selain tanaman padi, sekitar 998,4 ha lahan tanaman pangan lainnya seperti, jagung, kedelai, dan ubi kayu juga mengalami puso.
20. Pada 11 Desember 2017 di Kab. Solok, Sumbar, sekitar 55,5 ha tanaman padi di Kec. IX Koto Sei mengalami kerusakan, sehingga terancam gagal panen akibat diterjang banjir luapan Sungai Lasi.
21. Pada 8 Desember 2017 di Kab. Madiun, Jatim, sekitar 115 ha areal persawahan terendam banjir akibat tingginya curah hujan, sehingga terancam gagal panen.

SERANGAN HAMA TANAMAN PANGAN :

1. Pada 21 Januari 2018 di Kab. Bireuen, Aceh, hama wereng mulai menyerang sebagian tanaman padi berusia 2 hingga 3 minggu di Kec. Peusangan, Kota Juang, Jeumpa, Juli, dan beberapa kecamatan lainnya.
2. Pada 21 Januari 2018 di Kab. Lebak. Banten, seluas 615 ha tanaman padi dilaporkan puso karena serangan wereng batang coklat seluas 204 ha, kekeringan 6 ha, dan kebanjiran 405 ha.
3. Pada 18 Januari 2018 di Medan, Sumut, selama 2017, serangan hama wereng batang coklat pada tanaman padi di Sumut mencapai 470 ha.



Jumlah itu terdiri dari serangan ringan seluas 442,4 ha, serangan sedang 23,5 ha, dan serangan berat seluas 4,1 ha.

4. Pada 18 Januari 2018 di Kab. Langkat, Sumut, seluas 200 ha tanaman padi di Kec. Babalan diserang hama wereng.
5. Pada 18 Januari 2018 di Kab. Lamongan, Jatim, sekitar 609 ha tanaman padi di 19 kecamatan terancam gagal panen akibat rusak diserang hama tikus.
6. Pada 18 Januari 2018 di Kab. Kendal, Jateng, seluas 21 ha lahan persawahan petani di Kel. Patukangan terserang hama sundep (ulat). Akibatnya produksi petani menurun, bahkan terancam gagal panen.
7. Pada 14 Januari 2018 di Kab. Rokan Hulu, Riau, sebanyak 0,5 ha lahan padi masyarakat di Desa Rambah Baru, Kec. Rambah diserang hama yang mengakibatkan tanaman menguning dan mati secara mendadak.
8. Pada 4 Januari 2018 di Kab. Serang, Banten, ratusan ha tanaman padi yang tersebar di 10 kecamatan terserang hama wereng batang coklat dan terancam gagal panen. Sepuluh kecamatan yang terserang adalah Kec. Pontang, Lebakwangi, Ciruas, Cikande, Jawilan, Padarincang, Kragilan, Bandung, Pamarayan, dan Binuang.
9. Pada 2 Januari 2017 di Kab. Jembrana, Bali, sekitar 45 ha lahan persawahan di Subak Sangkaragung, Kel. Sangkaragung, Kec. Jembrana, terserang hama wereng yang menyebabkan tanaman padi rusak dan terpaksa harus dipanen lebih awal.
10. Pada 11 Desember 2017 di Kab. Musi Rawas Utara, Sumsel, hama burung pipit mengancam sebagian besar tanaman padi milik petani yang saat ini sudah mulai masuk musim berbuah.
11. Pada 28 Desember 2017 di Kab. Sumba Timur, NTT, hama ulat hijau menyerang tanaman jagung di 8 kecamatan, yaitu Kec. Ngaha Ori Angu, Kanatang, Pandawai, Kota Waingapu, Kangahu Eti, Umalulu, Rindi, dan Pangahu Lodu.
12. Pada 27 Desember 2017 di Kab. Jembrana, Bali, serangan hama keong kuning menyebabkan tanaman padi seluas 5.000 meter persegi di Subak Pangkung Gondang, Kel. Sangkar Agung, Kec. Jembrana terancam gagal panen.
13. Pada 22 Desember 2017 di Kab. Malaka, NTT, hama ulat daun menyerang sekitar 10 ha tanaman jagung di Desa Alkani, Kec. Wewiku.



14. Pada 14 Desember 2017 di Kab. Temanggung, Jateng, sekitar 15 ha tanaman padi di Kec. Jumo terserang hama tikus.

KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI

1. Pada 22 Januari 2018 di Kab. Aceh Timur, Aceh, kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi akibat peralihan penyuplai dari PIM ke Pupuk Gresik, sehingga agen pengecer pupuk mengalami kesulitan untuk memesan pupuk. Akibatnya, harga pupuk mengalami kenaikan, antara lain pupuk Urea menjadi Rp100.000,- per zak (50 kg), SP 36 Rp120.000,- per zak, dan Phonska Rp130.000,- per zak.
2. Pada 22 Januari 2018 di Kab. Aceh Utara, Aceh, kelangkaan pupuk Urea terjadi di Kec. Tanah Jambo Aye, Baktiya, dan Banda Baro. Akibatnya, sekitar 150 ha sawah di Desa Paya Beunytot, Kec. Banda Baro tidak dapat ditanami padi, padahal telah memasuki jadwal musim tanam pertama 2018.
3. Pada 21 Januari 2018 di Kab. Manggarai Timur, NTT, kelangkaan pupuk terjadi di Kec. Borong sejak 2015, sehingga mengakibatkan harga pupuk jenis Urea dan SP melonjak hingga Rp250.000,- per zak.
4. Pada 21 Januari 2018 di Kab. Balangan, Kalsel, kelangkaan pupuk terjadi sejak November 2017, mengakibatkan petani kekurangan pupuk dan mengganggu masa tanam. Harga pupuk non subsidi mencapai Rp250.000,- per zak, sehingga tidak terjangkau oleh petani.
5. Pada 17 Januari 2018 di Kota Langsa, Aceh, sebanyak 186 kelompok tani mengeluhkan kelangkaan pupuk jenis Urea, sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman padi mereka.
6. Pada 17 Januari 2018 di Kab. Bone, Sulsel, petani Kec. Cina kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, sementara pupuk non subsidi harganya mencapai Rp300.000,- per zak, sehingga tidak terjangkau oleh petani. Akibatnya, petani terpaksa menunda penanaman padi, padahal sudah memasuki musim tanam.
7. Pada 16 Januari 2018 di Kab. Bima, NTB, sekitar 150 warga Desa Leu, Kec. Bolo, melakukan aksi penghadangan truk pengangkut pupuk, kemudian memaksa menurunkan 150 kg pupuk dan membelinya, padahal pupuk tersebut merupakan alokasi Desa Renda. Warga terpaksa menghadang truk tersebut karena mengalami kesulitan memperoleh pupuk.



8. Pada 15 Januari 2018 di Kab. Semarang, Jateng, terjadi keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi jenis NPK, Ponska, dan ZA, sehingga para petani tidak melakukan pemupukan dan dikhawatirkan akan menurunkan produktivitas tanaman padi.
9. Pada 3 Januari 2018 di Kab. Sumenep, Jatim, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi jenis SP 36 dan ZA di Kec. Gapura, Kec. Batang-Batang, Kec. Dungkek, Kec. Lenteng, serta Kec. Ganding. Kelangkaan terjadi karena pasokan untuk 2018 sudah habis di awal musim tanam pada Desember 2017.
10. Pada 3 Januari 2018 di Kota Parepare, Sulsel, kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena realisasi pupuk Urea hanya 314 ton, jauh di bawah pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk sebesar 517,219 ton.
11. Berdasarkan data Kementan, kebutuhan riil pupuk bersubsidi pada 2017 sebanyak 13,18 juta ton, namun alokasi yang ditetapkan sesuai pagu anggaran hanya 9,55 juta ton. Dari jumlah tersebut, penyerapan pupuk bersubsidi hingga 10 November 2017 telah mencapai 77,88%.
12. Memasuki Desember 2017, wilayah yang mengalami kekurangan pupuk bersubsidi sebagai berikut :
13. Pada 22 Desember 2017 di Kab. Tebo, Jambi, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi jenis NPK, Phonska, dan Urea di pasaran, sehingga petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga tinggi untuk memupuk tanamannya.

DAERAH	JENIS PUPUK			
	UREA (TON)	NPK (TON)	SP-36 (TON)	ZA (TON)
ACEH	- 2.258			
SUMUT	- 10.991			
SUMBAR	- 2.372	- 1.950	- 1.252	- 926
SUMSEL	- 14.594	- 4.082	- 2.081	
KEP. BABEL	- 1.190	- 1.072	- 140	-6
JAMBI		- 33		
RIAU		- 1.132		
LAMPUNG	- 26.917	- 405	- 913	
DIY		- 346		- 98
JATENG	- 272			- 876
JATIM				- 31.672
BALI	- 576			- 493
KALBAR	- 4.406	- 5.552	- 852	- 150



DAERAH	JENIS PUPUK			
	UREA (TON)	NPK (TON)	SP-36 (TON)	ZA (TON)
KALTENG	- 352		- 125	
KALSEL	- 1.117	- 281		
KALTIM	- 965		- 433	- 44
SULTENG	- 1.311		- 243	- 882
SULUT	- 68			
GORONTALO			-97	- 30
SULTRA	- 2.168		- 294	- 95
SULSEL	- 12.157		- 463	- 3.585
SULBAR	- 861			- 381
NTT	- 1.727		- 55	

Sumber : PT Pupuk Indonesia Holding Company, diolah Desember 2017

14. Pada 19 Desember 2017 di Kab. Lampung Timur, Lampung, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi jenis Phonska sejak November 2017, padahal petani sudah memasuki masa pemupukan tanaman padi, jagung, dan singkong sejak awal Desember 2017.
15. Pada 14 Desember 2017 di Mataram, NTB, sekitar 45 orang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Mataram melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD NTB, mendesak DPRD dan Dinas Pertanian NTB menyelesaikan permasalahan kelangkaan dan tingginya harga pupuk bersubsidi.
16. Pada 14 Desember 2017 di Kab. Sambas, Kalbar, kelangkaan pupuk bersubsidi telah terjadi sejak November 2017. Permintaan tambahan kuota yang diajukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat hanya dipenuhi setengahnya.
17. Pada 11 Desember 2017 di Kab. Pasaman Barat, Sumbar, petani mengeluhkan terbatasnya kuota pupuk subsidi, sehingga terpaksa membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuknya.
18. Pada 6 Desember 2017 di Kab. Kotawaringin Barat, Kalteng, petani di Desa Kubu, Kec. Kumai kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sejak 2 bulan terakhir. Pihak distributor menyatakan kelangkaan pupuk disebabkan kuota pupuk bersubsidi sudah habis.
19. Pada 6 Desember 2017 di Sulsel, kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi di Kab. Bone, karena tidak adanya kedisiplinan para distributor dan penyalur pupuk, serta terdapat pengecer yang bekerja sama dengan para tengkulak.



Selain itu, kuota pupuk bersubsidi pada 2017 hanya sekitar 68.355 ton, sedangkan kebutuhan petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) mencapai sekitar 250.000 ton. Di Makassar, kelangkaan pupuk disebabkan keterlambatan distribusi pupuk dari Kota Makassar ke kabupaten/kota di Sulsel, khususnya di daerah yang relatif jauh, seperti Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, serta Kab. Kepulauan Selayar. Selain itu, kelangkaan pupuk bersubsidi juga terjadi di Kab. Bantaeng, Sulsel, sehingga meresahkan petani di Kec. Bissappu, Sinoa, dan Uluere.

20. Pada 5 Desember 2017 di Kab Lombok Utara, NTB, kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan alokasi di bawah RDKK yang diusulkan ke Dinas Pertanian NTB.
21. Pada 5 Desember 2017 di Kab. Sumbawa, NTT, kuota pupuk urea bersubsidi untuk tahun 2017 dari pemerintah pusat sekitar 24.000 ton, sementara kebutuhan petani menurut RDKK sebanyak 44.000 ton. Hal yang sama terjadi di Kab. Manggarai, NTT, kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk Kab. Manggarai sangat jauh dari kebutuhan petani. Petani membutuhkan 31.153. ton pupuk dari semua jenis pupuk, namun kuota hanya 5.044 ton.
22. Pada 5 Desember 2017 di Kab. Merangin, Jambi, ditemukan distributor pupuk bersubsidi yang menyalurkan 8 ton pupuk Phonska ke luar wilayahnya. Pupuk bersubsidi tersebut seharusnya disalurkan ke desa Airlago, Kec. Muara Siau, namun diselewengkan ke Desa Sungai Kapas, Kec. Bangko.
23. Pada awal Desember 2017 di Sulteng, Kasi Pupuk, Pestisida dan Albintan Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Parigi Moutong, Rahmatia mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayahnya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah antara alokasi pupuk yang disalurkan dengan RDKK yang diajukan kelompok tani. Hal yang saman terjadi di Kab. Sigi, Kab. Morowali, dan Kab. Banggai.
24. Pada 2 Desember 2017 di Kalbar, belum adanya distributor pupuk bersubsidi resmi di Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk menjelang musim tanam. Sebelumnya, di Kab. Sambas, kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi di Kec. Selakau, Selakau Timur, Salatiga, Jawai, dan Semparuk, sehingga menghambat petani melakukan penanaman lahan sawahnya.



25. Pada 1 Desember 2017 di Kab. Berau, Kaltara, petani di Kampung Samburakat, Kec. Gunung Tabur mengeluhkan kelangkaan pupuk terjadi sejak 2 bulan terakhir. Petani menduga pupuk bersubsidi banyak digunakan oleh petani sawit.
26. Pada 1 Desember 2017 di Kab. Kaur, Bengkulu, sejumlah petani di Kec. Nasal kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Pihak Dinas Pertanian setempat mengatakan, kelangkaan pupuk terjadi karena kurangnya pengawasan di jalur distribusinya, mengingat selama 2017 di Kab. Kaur tidak terbentuk Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida, akibat minimnya anggaran. Sebelumnya, petani di Kec. Tanjung Kemuning resah karena adanya dugaan peredaran pupuk Phonska palsu oleh sejumlah oknum pedagang. Beberapa petani yang telah membeli pupuk tersebut meragukan keasliannya karena di kemasan karung tertulis merek pupuk "Ponska" bukan "Phonska" seperti biasanya.

KERUSAKAN SALURAN IRIGASI :

1. Pada 18 Januari 2018 di Kab. Manokwari, Papua Barat, kelompok tani di Prafi Mulya dan Desa Distrik Prafi melewatkan dua kali masa tanam padi karena tidak mendapat pasokan air, akibat pembangunan instalasi irigasi yang belum terselesaikan. Padahal, dengan luas sawah mencapai 500 ha, petani seharusnya dapat menghasilkan 200 ton gabah dalam dua kali masa tanam.
2. Pada 18 Januari 2018 di Kota Padang, Sumbar, dari 20.400 ha saluran irigasi, sekitar 48,36% di antaranya mengalami kerusakan. Permasalahan yang terjadi pada irigasi, adalah banyaknya pintu air yang rusak, saluran bocor, dan lain-lain.
3. Pada 18 Januari 2018 di Kab. Sumbawa, NTB, kegiatan pembenahan dan pemeliharaan jaringan irigasi di Kab. Sumbawa terkendala minimnya anggaran Pemda yang tidak sesuai dengan jumlah dan luas areal jaringan irigasi. Akibatnya, kegiatan pemeliharaan irigasi hanya dapat dilakukan secara sporadis.
4. Pada 15 Januari 2018 di Kab. Aceh Timur, Aceh, debit air jaringan irigasi di Desa Suka Makmur, Kec. Indra Makmur menyusut akibat kegiatan normalisasi oleh PTPN I JRU. Akibatnya, pengairan ke sawah-sawah milik



petani tidak maksimal, sehingga sekitar 500 ha tanaman padi mengalami kekeringan.

5. Pada 10 Januari 2018 di Kab. Pidie, Aceh, sekitar 250 ha lahan persawahan petani di Gampong Kreet Paloh, Kec. Padang Tiji terancam gagal ditanami, karena minimnya pasokan air akibat kerusakan pada saluran irigasi Alue Baroh.
6. Pada 8 Januari 2018 di Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu, saluran primer irigasi Jabau di Desa Muara Danau, Kec. Seginim mengalami kerusakan sepanjang 20 meter. Akibatnya, sekitar 50 ha tanaman padi di Hampanan Jabau terendam banjir, sedangkan 70 ha tanaman padi di lokasi lain kesulitan mendapat air.
7. Pada 4 Januari 2018 di Kab. Serang, Banten, lahan persawahan di Kec. Ciruas, Lebakwangi, Pontang, Kramatwatu, dan Tanara mengalami kekurangan pasokan air, karena proses perbaikan bendungan dan saluran irigasi Pamarayan. Akibatnya, proses tanam petani terganggu, sehingga masa panen terancam mundur.
8. Pada 27 Desember 2017 di Kab. Empat Lawang, Sumsel, sejak 2015 petani di Desa Tanjung Ning Jaya, Desa Tanjung Ning Lama, dan Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling tidak bisa menanam padi di lahan persawahan seluas 350 ha, karena tidak adanya pasokan air akibat rusaknya saluran irigasi sepanjang 2.5 km di Desa Tanjung Ning Lama.
9. Pada 20 Desember 2017 di Kab. Pidie, Aceh, tanggul irigasi Lhok Mancang di Gampong Pulo Kawa, Kec. Tangse, rusak diterjang banjir setelah hujan deras yang terjadi di Kab. Pidie. Akibatnya, ratusan ha area persawahan di sekitar irigasi terendam banjir, sehingga petani tidak dapat menggarap sawahnya.
10. Pada 16 Agustus 2017 Kab. Seluma, Bengkulu, jaringan irigasi sekunder yang membentang dari Desa Padang Merbau hingga Sukarami sepanjang 5 km mengalami kerusakan, sehingga ratusan ha sawah petani di Desa Sukarami kekurangan air dan terancam gagal tanam.
11. Pada 13 Desember 2017 di Kab. Aceh Jaya, Aceh, pembangunan saluran pipa irigasi di Kec. Krueng Sabee terkendala kebocoran pada saluran tangkapan air bendungan (intake), sehingga tidak mampu menahan tampung debit air (lost saved). Akibatnya, sawah petani di sekitar lokasi irigasi masih belum teraliri air.



12. Pada 11 Desember 2017 di Kab. Rejang Lebong, Bengkulu, ketersediaan infrastruktur irigasi masih belum memadai serta belum dapat mengairi seluruh areal pertanian, sehingga sekitar 40% lahan sawah atau seluas 40.000 ha masih mengandalkan pengairan dari air hujan.

ALIH FUNGSI LAHAN :

1. Pada 20 Januari 2018 di DIY, berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab, Kulon Progo, pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport menyebabkan berkurangnya lahan sawah seluas 100,37 ha. Selain itu, relokasi warga terdampak juga mengorbankan 23,96 ha sawah. Dengan adanya penurunan jumlah lahan pertanian tersebut, produksi padi DIY diperkirakan berkurang 1.000 ton setiap tahun.
2. Pada 18 Januari 2018 di Kab. Pesisir Selatan, Sumbar, kontribusi sektor tanaman pangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) dalam beberapa tahun terakhir menurun akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan perkebunan sawit. Data BPS menunjukkan, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB 2016 hanya 2,1%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,5%.
3. Pada 17 Januari 2018 di Denpasar, Bali, lahan persawahan mengalami penyusutan 20-30 ha setiap tahunnya. Data Dinas Pertanian menunjukkan, pada 2017 terdapat 2.464 ha lahan pertanian, namun hingga awal 2018 menyusut menjadi 2.444 ha akibat banyaknya alih fungsi dan pembuatan *Land Consolidation* (LC).
4. Pada 16 Januari 2018 di Palu, Sulteng, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan paling banyak terjadi di Kab. Sigi dan Kab. Parigi Moutong. Apabila tidak segera dihentikan maka lahan pertanian semakin berkurang dan berpotensi mengalami kekurangan pangan.
5. Pada 16 Januari 2018 di Kab. Cianjur, Jabar, puluhan massa yang tergabung dalam Cianjur Aktivist Independen menggelar aksi unjuk rasa dengan melakukan pemasangan puluhan spanduk penolakan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan industri.
6. Pada 15 Januari 2018 di Kab. Seluma, Bengkulu, dari total sekitar 300 ha lahan pertanian di wilayah transmigrasi Desa Rawasari, Kec. Seluma Timur, hampir 80% beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Maraknya alih



fungsi disebabkan kurangnya faktor pendukung, seperti tidak tersedianya saluran irigasi yang memadai.

7. Pada 9 Januari 2018 di Kab. Sukabumi, Jabar, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian berada dalam kondisi cukup mengkhawatirkan. Dalam 3 tahun terakhir, terjadi penyusutan lahan sawah dari 1.585 ha pada 2014, menjadi 1.458 ha pada akhir 2017.
8. Pada 9 Januari 2018 di Banda Aceh, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Aceh, Mukhlis SP, MA mengatakan, sekitar 10% lahan sawah produktif di Aceh hilang setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan, seperti pembangunan kantor pemerintahan dan perumahan.
9. Pada 16 Desember 2017 di Jambi, semakin masifnya alih fungsi lahan di Kota Jambi telah menyebabkan luasan lahan pertanian padi terus berkurang. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menunjukkan pada 2017, lahan pertanian padi hanya tinggal 1.000 ha dari tahun sebelumnya seluas 1.400 ha.

ooOOOoo





SETIA LOYAL SOLID SEMANGAT

